

# Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Kepariwisata Desa melalui *Collaborative Governance* dalam Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

Dian Kagungan<sup>1\*</sup>, Anna Gustina Zainal<sup>2</sup>, Yulia Neta<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung

<sup>3</sup>Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Lampung

\*Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

\*Korespondensi: [dian.kagungan@fisip.unila.ac.id](mailto:dian.kagungan@fisip.unila.ac.id)

## Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan pariwisata dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana, khususnya pascatsunami yang terjadi pada tahun 2018. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran bersama antar pemangku kepentingan mengenai pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana berbasis pendekatan *collaborative governance*. Kegiatan ini melibatkan unsur akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah desa, media, dan NGO (kemitraan hexahelix). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta. Pelatihan berlangsung dengan baik, ditandai dengan meningkatnya hasil pre-test dan post-test yang dilakukan, peningkatan terendah sebesar 10% dan yang tertinggi sebesar 30%, yang menunjukkan peningkatan pemahaman terkait mitigasi bencana, terutama dalam aspek kesiapsiagaan, koordinasi, dan penguatan kelembagaan desa. Keberhasilan kegiatan ini juga terlihat dari antusiasme dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang hadir.

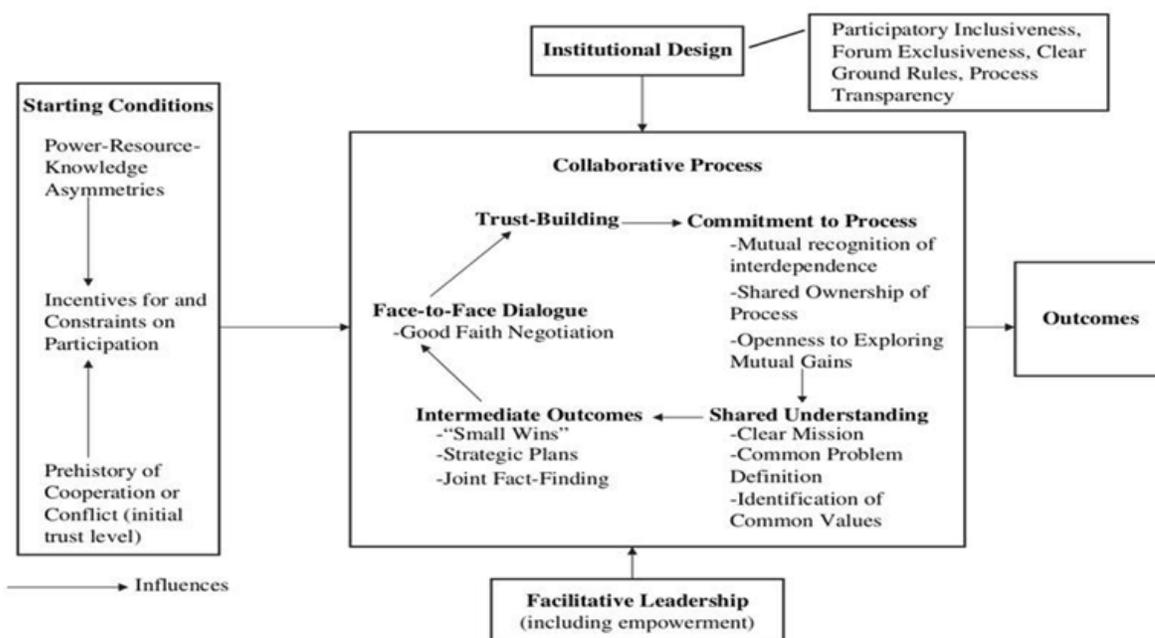
**Kata kunci:** Penguatan Kapasitas, *Collaborative Governance*, Mitigasi Bencana

## 1. ANALISIS SITUASI

Provinsi Lampung termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Kota Bandar Lampung berpotensi terdampak tsunami dan rutin mengalami banjir saat curah hujan tinggi. Kabupaten Lampung Selatan juga rawan bencana karena posisinya yang strategis dan kondisi geografisnya, namun memiliki potensi pariwisata besar seperti pantai dan air terjun. Potensi lokal ini dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata yang menjadi *leading sector* pembangunan daerah (Pitana, 2009). Pengembangan desa wisata juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja, industri kreatif,

transportasi, dan akomodasi (Andayani et al., 2017; Septian et al., 2019; Setiawan & Zulfanita, 2016). Desa Kunjir di Kabupaten Lampung Selatan memiliki kekayaan alam seperti laut, pantai, air terjun, dan sumber air panas. Mayoritas penduduknya merupakan Suku Lampung dengan budaya lokal yang khas. Desa ini telah menjadi kawasan unggulan pariwisata dan pada tahun 2023 mencatat kunjungan 9.352 wisatawan, terutama dari kalangan milenial. Selain Kunjir, desa wisata lainnya di Lampung Selatan meliputi Desa Kelawi dengan Pantai Minang Rua dan Desa Bulok dengan kerajinan tapis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil judul: "Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Kepariwisata Desa melalui Collaborative Governance dalam Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Lampung Selatan."

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur serta kelembagaan pariwisata desa melalui penguatan kemitraan antarpemangku kepentingan (*collaborative governance*), yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana, khususnya di Desa Kunjir sebagai lokasi kegiatan. Konsep *collaborative governance* mengacu pada suatu model tata kelola yang mengintegrasikan aktor-aktor dari sektor publik dan non-publik ke dalam forum kolektif yang bersifat formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus untuk pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Definisi ini menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan program publik dan aset-aset kolektif. Lebih lanjut, Ansell & Gash (2008) mengembangkan model *collaborative governance* yang menempatkan empat variabel utama sebagai pusat perhatian, yakni: (1) kondisi awal (*starting conditions*), (2) desain kelembagaan (*institutional design*), (3) kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan (4) proses kolaboratif (*collaborative process*). Dalam model ini, proses kolaboratif menjadi inti dari pelaksanaan *collaborative governance*, sementara tiga variabel lainnya merupakan prasyarat yang mendukung keberlangsungan dan efektivitas kolaborasi yang terbentuk.



**Gambar 1. Model collaborative governance**

Sumber: Ansell & Gash, 2008

Tata kelola kolaboratif menurut Emerson et al. (2012) merupakan pengembangan dari konsep Ansell dan Gash, melalui teori Collaborative Governance Regime (CGR). CGR menggambarkan himpunan prinsip, norma, dan tahapan pengambilan keputusan dalam sistem kolaboratif yang kompleks dan dinamis lintas sektor. Desa Kunjir, yang terdampak parah tsunami 2018, menunjukkan pentingnya mitigasi bencana yang terstruktur. Dalam kegiatan ini, pemangku kepentingan dari unsur akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, media, dan NGO membentuk kemitraan hexahelix untuk memperkuat kapasitas desa melalui pelatihan dan pendampingan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya kapasitas aparatur desa dan kelembagaan pariwisata, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan: (i) merumuskan model penguatan kemitraan untuk mitigasi bencana, dan (ii) meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup tiga pendekatan utama, yaitu:

- a) Pendekatan Kognitif: Tim pengabdian memberikan penguatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan kepada aparat desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta pemuda Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa. Materi pelatihan disesuaikan dengan tema utama kegiatan pengabdian, yakni peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata desa dalam konteks mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
- b) Pendekatan Partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Advokasi: Tim melaksanakan forum diskusi kelompok terarah FGD dan kegiatan advokasi dengan tujuan menjembatani aspirasi serta inspirasi Masyarakat, khususnya kelompok sadar wisata, kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pariwisata dan mitigasi bencana di Kabupaten Lampung Selatan.
- c) Monitoring dan Evaluasi: Kegiatan ini disertai dengan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap capaian program. Tim pengabdian berharap kegiatan ini tidak bersifat jangka pendek, melainkan berkelanjutan mengingat urgensi tema yang diangkat.

Untuk menunjang efektivitas metode di atas, langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain:

- a) Observasi dan kunjungan lapangan, meliputi identifikasi potensi lokal dan analisis kearifan lokal masyarakat Desa Kunjir yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan.
- b) Pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan melalui sesi penyampaian materi konseptual serta pelatihan teknis berbasis praktik langsung.
- c) Pelaksanaan FGD dan eksposur kegiatan, bertujuan untuk membangun dialog lintas aktor serta memperkuat komitmen bersama dalam pengembangan desa wisata dan upaya mitigasi bencana.
- d) Penyusunan rekomendasi kebijakan, hasil kegiatan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan stakeholder terkait, guna mendukung pengembangan potensi unggulan Desa Kunjir secara berkelanjutan.

Pihak-pihak yang terlihat dalam kegiatan pengabdian ini:

- a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung
- b) Tim Pengabdian dari Universitas Lampung
- c) Tim pendukung: 2 orang mahasiswa, 1 orang alumni, dan 1 staf administrasi

- d) Aparatur Pemerintah Desa Kunjir dan jajarannya, Kelompok Sadar Wisata, Pemuda/Karang Taruna (20 orang), Fasilitator Lapangan 1 orang, Kalangan media, NGO, dan pelaku usaha lokal (informal leader)

Kegiatan ini menargetkan 20 peserta sebagai sasaran antara, yang terdiri dari aparatur desa, kelompok sadar wisata, dan pemuda. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Pelatihan dilakukan dalam empat sesi utama, yaitu: penyampaian konsep dasar dan pelaksanaan *pre-test*, penguatan materi konsep lanjutan, praktik langsung (simulasi atau implementasi materi), *post-test* untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi inti.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Coffee Mahani, yang terletak di tepi pantai Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa Kunjir, Bapak Rio Imanda, S.H., M.H., beserta jajaran perangkat desa, akademisi Universitas Lampung (sebagai formal leaders), masyarakat lokal, kelompok sadar wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tokoh masyarakat, kalangan media, NGO, serta pelaku usaha lokal sebagai bagian dari aktor hexahelix.

### 3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Model tata kelola kolaboratif berdasarkan rujukan dari Ansell dan Gash menggunakan empat (4) dimensi untuk mengukur proses yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi yang terjadi bertujuan untuk mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan tersebut. Pertama, proses kolaboratif sebagai inti dari tata kelola kolaboratif. Kedua, terdapat tiga (3) dimensi lain yang memengaruhi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif (Ansell & Gash, 2008). Dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula, proses kolaborasi dibagi menjadi tiga (3) tahap sesuai dengan manajemen penanggulangan bencana, yaitu: tahap pra-bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pascabencana.

#### *Proses Kolaborasi*

Proses kolaboratif merupakan kegiatan partisipatif dari para pemangku kepentingan dalam bentuk diskusi atau dialog yang menghasilkan keputusan berbasis konsensus dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ansell & Gash (2008) mengidentifikasi proses kolaboratif sebagai suatu rangkaian yang

mencakup dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

**a) Face-to-Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)**

Dialog tatap muka merupakan pertemuan langsung antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan waktu yang sama untuk melakukan dialog secara interaktif terkait kepentingan bersama. Dialog ini dilakukan guna menghasilkan pemahaman yang sama mengenai tindakan yang akan diambil. Dialog Tatap Muka dalam dialog dilakukan dalam 3 tahap penanggulangan bencana yaitu:

- 1) Tahap Pra-Bencana. Dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Desa Kunjir, proses kolaborasi idealnya menjadi prioritas utama. Namun, kenyataannya masih terdapat hambatan dalam komunikasi antarpemangku kepentingan yang seharusnya menjalin kolaborasi. Kurangnya dialog tatap muka secara intens dan terjadwal antara para pihak terkait menunjukkan bahwa kolaborasi sering kali terjadi hanya karena tuntutan tugas atau fungsi dari instansi pemerintah semata. Hal ini menyebabkan usulan dari masyarakat dan pemerintah desa kurang terakomodasi secara optimal karena belum adanya kesepakatan bersama yang diperoleh melalui dialog tatap muka. Oleh karena itu, peningkatan intensitas komunikasi langsung antarpemangku kepentingan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat komitmen pemerintah daerah sebagai *facilitative leader*, bersama DPRD dalam mendorong kolaborasi yang sejati pada tahap pra-bencana.
- 2) Tahap Tanggap Darurat. Pada tahap tanggap darurat, pelaksanaan dialog tatap muka di Desa Kunjir, Kecamatan Bakauheni, berlangsung dengan baik. Pemerintah daerah mampu membangun komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait, sehingga koordinasi dalam penanganan bencana dapat terlaksana secara cepat dan efisien. Proses dialog ini menghasilkan pemahaman yang selaras antaraktor dan melahirkan kesepakatan yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan program tanggap darurat. Praktik komunikasi terbuka dan kolaboratif ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka menjadi elemen penting dalam mempercepat proses penanggulangan bencana secara terkoordinasi.
- 3) Tahap Pascabencana. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dialog tatap muka pada tahap pascabencana dilaksanakan oleh pemangku kepentingan bersama kepala desa dan masyarakat terdampak. Fokus dialog diarahkan

pada upaya pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana. Pada tahap ini, kepercayaan (*trust building*) menjadi aspek sentral dari kolaborasi. Membangun kepercayaan antaraktor dengan tujuan yang sama dalam penanggulangan bencana merupakan langkah penting. Proses ini dimulai sejak tahap pra-bencana melalui penyusunan kebijakan mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang didukung oleh alokasi dana dari APBD. Peran para aktor dalam membangun kepercayaan diwujudkan melalui pembentukan kelompok kerja yang menjalankan kajian partisipatif. Dalam konteks penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lampung Selatan, kepercayaan antarpemangku kepentingan menjadi fondasi bagi keberlangsungan kerja sama, baik dalam tahap tanggap darurat maupun pascabencana. Kolaborasi yang didasarkan pada kepercayaan mendorong munculnya pemahaman bersama dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif di kalangan masyarakat dan pihak terkait.

**b) *Commitment to Process***

Kolaborasi hanya dapat berjalan efektif apabila setiap pemangku kepentingan memiliki komitmen yang kuat. Komitmen ini bergantung pada keyakinan dan kepercayaan bahwa semua pihak harus saling menghormati pandangan serta kepentingan masing-masing. Sebelum kolaborasi diwujudkan dalam bentuk konkret, komitmen terhadap integritas proses musyawarah dan negosiasi menjadi syarat utama. Komitmen juga menjadi modal utama dalam menciptakan kolaborasi yang inklusif, sehingga dapat meminimalisir penolakan dari masyarakat. Ukuran keberhasilan suatu program terletak pada sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bentuk nyata dari komitmen ditunjukkan melalui pertemuan-pertemuan resmi, forum diskusi, dan dialog antarlembaga mengenai ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran penanggulangan bencana. Pada tahap tanggap darurat dan pascabencana, komitmen diwujudkan melalui pemulihan, normalisasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, seperti air bersih dan layanan kesehatan.

**c) *Shared Understanding***

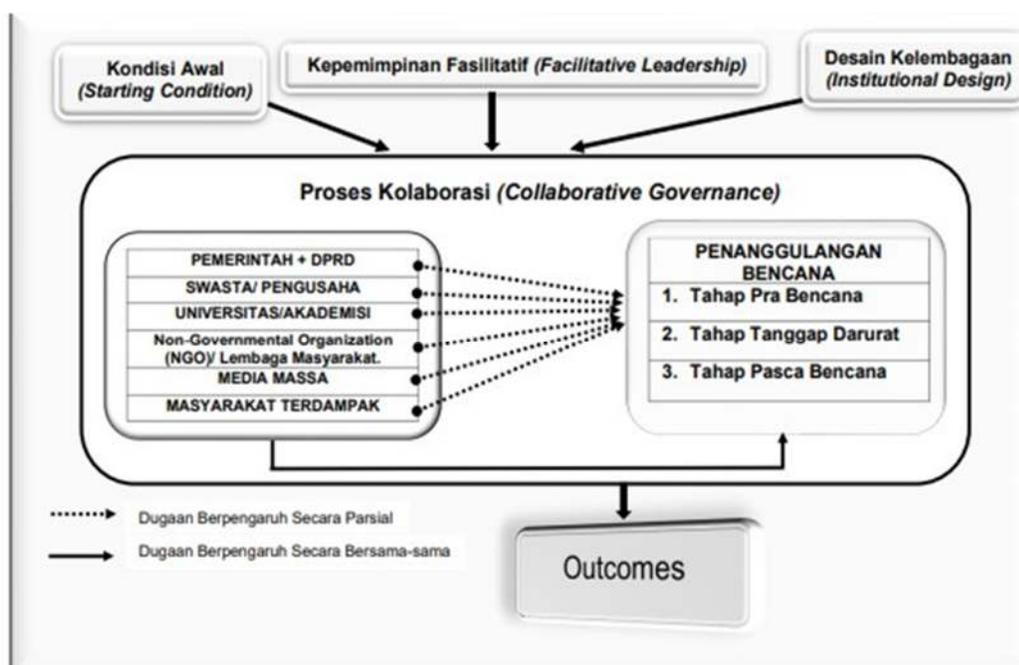
Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Sosialisasi oleh OPD membangun kesadaran, keterampilan, dan kesiapsiagaan masyarakat. Pemahaman bersama mendorong pembelajaran kolektif dan strategi

pengurangan risiko, misalnya, kesediaan masyarakat merelakan lahan demi normalisasi aliran air.

d) *Intermediate Outcome*

Hasil sementara kolaborasi menunjukkan efektivitas kerja sama sebelum hasil akhir tercapai. Pada tahap pra-bencana, kolaborasi masih terfragmentasi dan belum melibatkan akademisi secara optimal. Namun, pada tahap tanggap darurat dan pascabencana, kolaborasi semakin baik dengan koordinasi intensif dan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan pascabencana.

Dalam aspek kognitif, tim pengabdian memberikan pengetahuan tentang pengembangan kepariwisataan melalui penyampaian materi awal mengenai pentingnya kapasitas kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam kebijakan pengembangan desa wisata dan pengurangan risiko bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini tentu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 2. Model ideal *collaborative governmance* dalam penanggulana bencana di Kabupaten Lampung Selatan

Sumber: Ansell & Gash, 2008

*Evaluasi dan Pembahasan*

Materi inti yang disampaikan mencakup: (i) pengembangan desa wisata dan manajemen bencana, serta (ii) *collaborative governance* dalam mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Materi disampaikan oleh Tim Pengabdian Universitas Lampung dan fasilitator melalui *focus group discussion* dan diskusi interaktif yang diikuti antusias oleh peserta. Kegiatan advokasi dilakukan dengan menghubungkan aspirasi kelompok sadar wisata dan karang taruna Desa Kunjir dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta para pemangku kepentingan yang mendukung pengembangan desa wisata dan kolaborasi dalam manajemen bencana. Kegiatan ini sejalan dengan visi Bupati untuk memajukan sektor pariwisata daerah, dan telah terbukti meningkatkan pemahaman dasar peserta secara signifikan.

*Pretest* dan *posttest* dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta pelatihan sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dilakukan pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan. Hasil *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil *Pretest* dan *Posttest*

| Peserta    | Nilai <i>Pre-Test</i> | Nilai <i>Post-Test</i> | Persentase Kenaikan |
|------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Peserta 1  | 60                    | 70                     | 10                  |
| Peserta 2  | 50                    | 80                     | 30                  |
| Peserta 3  | 50                    | 80                     | 30                  |
| Peserta 4  | 50                    | 70                     | 60                  |
| Peserta 5  | 50                    | 80                     | 30                  |
| Peserta 6  | 60                    | 90                     | 30                  |
| Peserta 7  | 50                    | 80                     | 30                  |
| Peserta 8  | 50                    | 70                     | 20                  |
| Peserta 9  | 60                    | 80                     | 20                  |
| Peserta 10 | 70                    | 90                     | 20                  |
| Peserta 11 | 50                    | 80                     | 30                  |
| Peserta 12 | 70                    | 80                     | 20                  |
| Peserta 13 | 60                    | 90                     | 30                  |
| Peserta 14 | 60                    | 90                     | 30                  |
| Peserta 15 | 70                    | 90                     | 20                  |
| Peserta 16 | 50                    | 70                     | 20                  |
| Peserta 17 | 70                    | 80                     | 10                  |
| Peserta 18 | 60                    | 70                     | 10                  |
| Peserta 19 | 50                    | 80                     | 30                  |
| Peserta 20 | 60                    | 90                     | 30                  |

Sumber: Hasil pengabdian, 2024.

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, peningkatan nilai peserta berkisar antara 10% hingga 30%. Peningkatan terendah sebesar 10% terjadi karena peserta telah memiliki pengetahuan dasar yang cukup, ditunjukkan dengan nilai awal 70 dan nilai akhir 90. Sementara itu, peningkatan tertinggi sebesar 30% dialami oleh peserta dengan nilai awal 50 menjadi 80, menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait tugas dan fungsi mereka dalam kelompok sadar wisata, karang taruna, dan BUMDes. Pelatihan ini memperkuat pemahaman peserta tentang pentingnya mitigasi dan pengurangan risiko bencana (tsunami, banjir, dan abrasi pantai) melalui penguatan *collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata Kunjir. Setelah pelatihan, sebagian peserta mencapai nilai 90, meningkat dari nilai awal 50.

#### 4. PENUTUP

Hasil kegiatan pelatihan dan advokasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Lampung di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan capaian yang positif. Keberhasilan ini dibuktikan melalui hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta, khususnya dalam aspek penguatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan dan mitigasi bencana. Peningkatan nilai peserta berkisar antara 10% hingga 30% dengan rata-rata peningkatan tertinggi terjadi pada aspek kognitif. Berdasarkan hasil tersebut, kegiatan pengabdian ini dapat dinyatakan berhasil.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Aparat Desa Kunjir yang dipimpin oleh Bapak Rio Imanda, S.H., M.H., beserta jajaran, Kelompok Sadar Wisata, BUMDes, pemuda/milenial dan Karang Taruna, kalangan media, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1). <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1). <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Pitana, I. G. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Septian, Y., Ndangi, W. O. E. S., Manyoe, I. N., Taslim, I., Umar, E. P., Salama, T. H., & Napu, S. S. (2019). Asesmen Nilai-Nilai Pariwisata Terhadap Fitur Geologi Daerah Bongo dan Sekitarnya Sebagai Dasar Pengembangan Geowisata di Pesisir Selatan Gorontalo. *Jurnal Azimut*, 2(2). <https://doi.org/10.31317/jaz.v2i2.489>
- Setiawan, B., & Zulfanita. (2016). Pengembangan Desa Wisata Jatimalang Berbasis Industri Kreatif. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.1.2.101-109>